

TESIS

**PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DALAM OPTIMALISASI PENCEGAHAN POTENSI KORUPSI
PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA**

**THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE
FOR OPTIMIZING THE POTENTIAL CORRUPTION
PREVENTION IN THE DEVELOPMENT OF THE
NUSANTARA CAPITAL (IKN)**



Oleh :

CAHYA HARDIANTO HAREFA

2210622047

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
JAKARTA
2024**

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DALAM OPTIMALISASI PENCEGAHAN POTENSI KORUPSI
PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program
Studi Hukum Program Magister

**Disusun dan diajukan oleh:
CAHYA HARDIANTO HAREFA
2210622047**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
BAIK DALAM OPTIMALISASI PENCEGAHAN POTENSI
KORUPSI PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA**

Disusun dan diajukan oleh:
CAHYA HARDIANTO HAREFA
2210622047

Menyetujui,

Pembimbing 1



Dr. BENIHARMONI HAREFA., SH., LL.M

Pembimbing 2



Dr. HANDAR SUBHANDI
BAKHTIAR SH MH MTr. Adm. Kes

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

**PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
BAIK DALAM OPTIMALISASI PENCEGAHAN POTENSI
KORUPSI PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA**

**Disusun dan diajukan oleh:
CAHYA HARDIANTO HAREFA
NIM. 2210622047**

**Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Pada Tanggal 30 Mei 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan**

Menyetujui:

Pembimbing 1

Dr. Beniharmoni Harefa., SH., LL.M
NIP. 198709222018031002

Pembimbing 2

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes.
NIP. 199304282022031009

**Koordinator Program Studi
Magister Hukum**

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes.
NIP. 199304282022031009



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Suberman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Cahya Hardianto Harefa., SE., Ak, MBA., CA
NIM : 2210622047
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **“PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM OPTIMALISASI PENCEGAHAN POTENSI KORUPSI PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Jakarta,
Yang Membuat Pernyataan



Cahya Hardianto Harefa., SE., Ak,
MBA., CA
NIM. 2210622047

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cahya Hardianto Harefa., SE., Ak, MBA., CA

NIM : 2210622047

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM OPTIMALISASI PENCEGAHAN POTENSI KORUPSI PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Cahya Hardianto Harefa., SE.,
Ak, MBA., CA
NIM. 2210622047

KATA PENGANTAR

Puja puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya tesis ini. Gagasan yang mendasari tajuk permasalahan ini timbul dari adanya rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota negara Indonesia yang masih rentan terjadi potensi korupsi dalam pelaksanaan dan regulasi pendukungnya. Tesis ini merupakan pengamatan penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta untuk mengidentifikasi potensi korupsi tersebut agar saran kebijakan dapat dirumuskan sebagai upaya pencegahan korupsi di masa yang akan datang.

Dalam rangka penyusunan tesis ini, penulis menemukan banyak tantangan dan hambatan, namun itu dapat diatasi berkat adanya bantuan berbagai pihak, sehingga tesis ini dapat selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- 1) Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Dr. Drs. Anter Venus, M.A. Comm.;
- 2) Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Dr. Suherman, S.H., LL.M;
- 3) Koordinator Program Studi Magister Hukum Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H. M.H., M. Tr.Adm.Kes;
- 4) Pembimbing Utama Dr. Beniharmoni Harefa., SH., LL.M dan Pembimbing Pendamping Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H. M.H., M. Tr.Adm.Kes;
- 5) Para Penguji Dr. Beniharmoni Harefa., S.H., LL.M (Ketua Penguji); Dr. Handar Subhandi Bakhtiar S.H., M.H., MTr. Adm. Kes (Sekretaris Penguji); Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H (Penguji I); Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H. (Penguji II);
- 6) Seluruh keluarga dan kerabat penulis yang selalu menginspirasi untuk terus belajar dan meraih cita-cita, sekaligus mendorong dan memberi dukungan penuh agar tesis ini selesai;
- 7) Para staf di lingkungan Fakultas Hukum Program Studi Magister dan seluruh rekan Magister Hukum UPN Veteran Jakarta Angkatan 2024.
- 8) Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis.

Terakhir, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mereka yang namanya tidak tercantum tetapi telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Jakarta, Juni 2024
Penulis,

Cahya Hardianto Harefa., SE.,
Ak, MBA., CA

ABSTRAK

Keputusan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota negara Indonesia merupakan salah satu keputusan politik kenegaraan yang memiliki visi besar menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai proyek dengan anggaran besar dan kompleks, pengelolaan keuangannya harus dilakukan secara akuntabel, bebas dari praktik korupsi, dan didukung dengan sistem pengawasan yang ketat agar dapat berjalan dengan mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*. Oleh karena itu, kebijakan dan regulasi pembangunan IKN harus sejalan dengan prinsip dan tujuan tersebut. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi pembangunan IKN saat ini terkait dengan potensi korupsi, peluang, dan hambatan dalam pencegahannya. Sehingga studi ini dapat menghasilkan saran kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan IKN. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian menggunakan analisis kualitatif menggunakan sumber data/bahan hukum primer dan sekunder. Kegiatan pengolahan data/bahan hukum dimulai dengan pengumpulan, analisis dan penyajian, selanjutnya dirumuskan dan disajikan secara sistematis dan deskriptif sesuai pokok bahasan masing-masing. Hasil kajian menunjukkan adanya potensi korupsi pada aspek kelembagaan Otorita IKN yang masih lemah dalam pengawasan, skema pembiayaan yang rentan konflik kepentingan, dan pelaksanaan pembangunan IKN di mana dalam pengadaan barangnya masih berpotensi menimbulkan suap dan konflik kepentingan. Hal ini menjadikan pembangunan IKN tidak sejalan dengan prinsip *good governance*. Maka untuk mencegah potensi korupsi dalam pembangunan IKN, diperlukan optimalisasi pencegahan yang lebih baik di ketiga aspek tersebut, baik dalam penyusunan klausul pada regulasi maupun pembentukan lembaga. Hal ini diharapkan dapat membuat proyek IKN dapat berjalan efisien, efektif, dan tidak terjadi praktik korupsi.

Kata Kunci: IKN, pembangunan, regulasi, korupsi, *good governance*

ABSTRACT

The decision to develop the Archipelago Capital (IKN) as the capital city of Indonesia is one of the state political decisions that has a big vision towards a Golden Indonesia 2045. As a project with a large and complex budget, its financial management must be carried out in an accountable manner, free from corrupt practices, and supported with a strict monitoring system so that it can run by prioritizing the principles of good governance. Therefore, IKN development policies and regulations must be in line with these principles and objectives.

This study aims to describe the current condition of IKN development related to the potential for corruption, opportunities and obstacles in preventing it. So this study can produce policy that can be implemented in the implementation of IKN development. The legal research method used in writing this thesis is a normative juridical research method, with a statutory approach. The research uses qualitative analysis using primary and secondary legal data/material sources. Data/legal material processing activities begin with collection, analysis and presentation, then formulated and presented systematically and descriptively according to the respective subject matter. The results of the study show the potential for corruption in the institutional aspects of the IKN Authority which are still weak in supervision, financing schemes which are vulnerable to conflicts of interest, and the implementation of IKN development where the procurement of goods still has the potential to give rise to bribery and conflicts of interest. This makes the development of IKN not in line with the principles of good governance.

So, to prevent potential corruption in IKN development, better prevention optimization is needed in these three aspects, both in the preparation of clauses in regulations and the formation of institutions. It is hoped that this will enable the IKN project to run efficiently, effectively and without corrupt practices occurring.

Keywords: *IKN, development, regulation, corruption, good governance*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Orisinalitas Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis.....	21
B. Bagan Kerangka Pikir	32
C. Definisi Operasional.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	37

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	38
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	42
D. Analisis Bahan Hukum	42

BAB IV PEMBAHASAN

A. Tata Kelola Pembangunan IKN dihadapkan pada Potensi Korupsi, Peluang, dan Hambatan dalam Pencegahannya	44
B. Kebijakan untuk Mencegah Potensi Korupsi dalam Pembangunan IKN	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA	97
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Orisinalitas Penulisan.....	15
Tabel 2 Sistem Pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN)	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Pembangunan IKN (sumber: Kementerian PUPR).....	71
Gambar 2 Lini Masa Pembangunan IKN.....	72
Gambar 3 Foto Udara Kawasan Pembangunan IKN	73
Gambar 4 Sistem Whistle Blower Otorita IKN	89